

BAB III

POLA PEMBIAYAAN GOTONG ROYONG PDI PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN PEMILUKADA JAWA TENGAH TAHUN 2018

3.1. Pola Pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan dalam Pemenangan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Pola Gotong Royong PDI Perjuangan akan memberikan dampak kepada anggota partai tentang kuatnya kesadaran dalam berpartai, rasa bertanggung jawab dan rasa memiliki partai yang kuat dalam diri setiap kader atau anggota partai PDI Perjuangan. Gotong Royong menjadi landasan utama partai dalam menghimpun seluruh anggotanya untuk ikut serta dan mendukung model pengelolaan keuangan partai yang transparan dan bertanggung jawab sebagai jalan berdikari partai. Guna mewujudkan kedaulatan Partai tersebut, maka Gerakan Gotong Royong Kemandirian Kerja Partai menjadi jalan berdikari Partai.

Pembiayaan Gotong Royong yang dilakukan PDI Perjuangan melalui mekanisme pengumpulan sejumlah uang yang tidak ditetapkan besaran jumlahnya dan disetorkan ke (rekening khusus : 00013-01-50-075498-0) yang nantinya dimuat dalam dokumen Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Dokumen LPSDK berisikan penerimaan sumbangan dari anggota PDI Perjuangan. Dalam penelitian ini sumbangan berasal dari 1779 anggota PDI Perjuangan Jawa Tengah yang dimana tanpa adanya paksaan ataupun penekanan dari partai. Pembiayaan

Gotong Royong PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018 terkumpul menjadi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Tabel 3.1

LPPDK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah

H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP – H. Taj Yasin Maimoen

No	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Saldo Per Tanggal 12 Februari 2018	200.000.000		
1	Kas di Rekening Khusus	200.000.000		
2	Barang			
3	Tagihan			
4	Utang			
B.	Penerimaan	19.060.000.000		
1	Pasangan Calon	600.000.000		
2	Partai Politik/Gabungan Partai Politik			
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	18.460.000.000		
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
5	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta			
6	Lain-lain Komitmen			
C.	Pengeluaran	18.228.218.725		
1	Pengeluaran Operasi	18.228.218.725		
	a. Pertemuan Terbatas	379.725.000		
	b. Pertemuan Tatap Muka	97.849.750		
	c. Pembuatan Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik			
	d. Penyebaran Bahan Kampanye	14.114.468.500		
	e. Pembuatan Design Alat Peraga Kampanye	2.544.079.000		
	f. Rapat Umum	830.629.000		
	g. Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	179.980.800		
	h. Lain-lain	81.486.675		

2.	Pengeluaran Modal			
	a. Pembelian Kendaraan			
	b. Pembayaran Peraga			
	c. Lain-lain			
3.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Pemberian Piutang			
	b. Pembayaran Utang			
D	Saldo per 23 Juni 2018	1.034.132.986		
	Kas di Rekening Khusus	7.351.711		
	Kas Tunai	1.026.781.725		
	Barang			
	Tagihan Kepada			
	Utang			

Sumber : Dokumen LPPDK Ganjar Pranowo – Taj Yasin Maimoen 2018

LPPDK atau Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pasangan Ganjar-Yasin tahun 2018, memiliki jabaran Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang terletak di Kas Rekening Khusus sejumlah Rp. 200.000.000,00. Dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) memiliki total penerimaan sejumlah Rp.19.060.000.000,00 yang berasal dari pasangan calon Rp.600.000.000,00 dan sumbangan melalui gotong royong Rp.18.460.000.000,00 yang termuat dalam dokumen LPSDK sejumlah 1779 penyumbang yang berasal dari gabungan partai koalisi pasangan Ganjar-Yasin.

Pengeluaran Dana Kampanye dalam dokumen LPPDK di atas meliputi pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Pembuatan Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik, Penyebaran Bahan

Kampanye, Pembuatan Design Alat Peraga Kampanye, Rapat Umum, Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan, dan lain-lain. Dalam pengeluaran porsi terbesar dalam membiayai penyebaran bahan kampanye yang membutuhkan pendanaan sebesar 14M lebih. Selain pengeluaran di atas pembiayaan gotong royong PDI Perjuangan masih memiliki pembiayaan yang lain yang tidak melanggar aturan seperti Saksi, Rapat-rapat dan deklarasi.

3.1.1. Sumber Pembiayaan PDI Perjuangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen merupakan pasangan yang diusung melalui hasil konsolidasi seluruh fraksi PDI Perjuangan di Jawa Tengah baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota. Jargon “*Jateng Tetep! Gayeng*” masih disematkan pada pasangan Ganjar-Yasin dimana pola pembiayaan yang dilakukan oleh partai adalah pembiayaan yang secara gotong royong dengan memasang foto Ganjar-Yasin yang dilakukan seluruh anggota fraksi di Jawa Tengah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota. Pembiayaan ini murni dilakukan oleh setiap anggota tanpa rasa ingin adanya timbal balik dari pasangan Ganjar-Yasin melainkan murni menjalankan instruksi partai untuk melakukan pembiayaan Gotong Royong untuk meringankan beban kepada pasangan calon.

Sumber pembiayaan PDI Perjuangan dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 berasal dari gotong royong kader PDI Perjuangan. Selanjutnya akan dianalisis lebih teliti mengenai pola gotong royong PDI Perjuangan dalam pilukada Jawa Tengah tahun 2018. Untuk mengetahui pola gotong royong PDI Perjuangan dilakukan penelitian di enam karesidenan Jawa Tengah yang meliputi karesidenan Surakarta, Semarang, Pati, Magelang, Banyumas, dan Pekalongan. Dari penelitian di enam karesidenan didapatkan temuan lapangan mengenai sumber pembiayaan PDI Perjuangan dalam pilukada Jawa Tengah tahun 2018.

a. Karesidenan Surakarta

Tim Pemenangan Ganjar-Yasin Solo Raya menggunakan prinsip meraih suara dan simpati masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya yang dikeluarkan yang sangat efisien. Biaya yang efisien ini akan didapatkan dengan cara melaksanakan konsolidasi partai dengan diberikan muatan didalamnya untuk pemenangan pilukada Ganjar-Yasin. Selain itu pembiayaan kampanye yang efisien dilakukan dengan tidak menggelar kampanye terbuka yang membutuhkan dana yang sangat banyak pada akhirnya nanti. Solo Raya menggunakan pola gotong royong kader sampai tingkat ranting bahkan tingkat anak ranting untuk sosialisasi

kepada seluruh masyarakat solo raya. Selain gotong royong kader juga melaksanakan gotong royong dalam pembiayaan atau bisa dikatakan “urunan” dimana setiap Pengurus Anak Cabang (PAC) yang berada ditingkat kecamatan, secara mandiri mengeluarkan biaya untuk konsolidasi dan sosialisasi kepada setiap pengurus ranting/kelurahan bahkan sampai kepada anak ranting secara pribadi dan mandiri dimasing-masing PAC.

Selaku kepala daerah/walikota Solo FX. Rudyatmo tidak mengeluarkan biaya untuk melaksanakan kampanye, namun dengan kebijakan-kebijakan partai PDI Perjuangan yang selaras dengan visi-misi pasangan Ganjar-Yasin. Yakni dengan mengeluarkan pembiayaan yang jelas berpengaruh terhadap efisiensi pembiayaan dalam pemilukada tahun 2018. Dalam interview yang dilaksanakan bersama FX. Hadi Rudyatmo di Balaikota Surakarta pada tanggal 28 Januari 2019, mengatakan bahwasanya;

“Kebijakan PDI Perjuangan yang dinanti oleh masyarakat, seperti persoalan pendidikan dan kesehatan yang ada di Solo seperti contoh masyarakat yang tidak bisa pulang dari rumah sakit itu kita yang menyelesaikan administrasinya, siswa-siswi yang tidak bisa mengambil ijazah dikarenakan belum melunasi biaya sekolah itu semua kita selesaikan melalui tingkat anak ranting, ranting, PAC sampai ketingkat DPC yang terkoordinasi. Kalau untuk masalah Pembiayaan Gotong Royong kita biayai langsung bersama secara mandiri, kita tidak meminta kemana-mana kita langsung biayai secara

mandiri dan tercatat dalam LPSDK berapa jumlah biaya yang dikeluarkan teman-teman di Solo Raya“

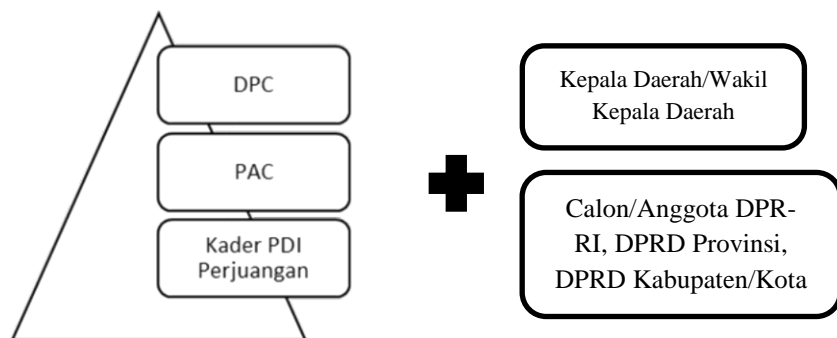
Dalam pilukada tahun 2018 pembiayaan gotong royong Solo Raya dilaksanakan secara mandiri, iuran dimasing-masing tingkat. Anak ranting, ranting, PAC sampai ke tingkat DPC menyelesaikan pembiayaan secara mandiri dengan cara Gotong royong dimasing-masing tingkatan tersebut, atau dapat dikatakan bahwasanya pembiayaan murni dibiayai secara pribadi dengan pola gotong royong setiap kader PDI Perjuangan di Solo Raya. Komposisi pembiayaan tidak menekankan kepada besaran jumlah yang harus dikeluarkan, namun murni kesadaran kader PDI Perjuangan yang ada di setiap tingkatannya.

Jadi dapat dikatakan porsi pembiayaan dalam pilukada tidak mempengaruhi kinerja setiap anggota partai, karena PDI Perjuangan merupakan partai yang sudah terbiasa dengan bantu-binantu melalui Gotong Royong. Komposisi sendiri yang mengisi adalah kader yang berada di kursi legislatif, dari seluruh calon legislatif, bahkan dari kader tingkat anak ranting sampai tingkat DPC yang ingin membantu dalam hal pembiayaan secara gotong royong dalam kemenangan pilukada 2018.

Sumber pembiayaan PDI Perjuangan di Solo Raya menggunakan pola gotong royong dari tingkat paling dasar yakni Ranting dan Anak Ranting, dimana yang dimaksud Ranting adalah pengurus PDI Perjuangan yang berada ditingkat dasar yakni kelurahan atau desa. Selanjutnya terdapat sumber yang berasal dari Pengurus Anak Cabang (PAC) yang berada ditingkat Kecamatan dan sumber lainnya berasal dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan yang berada ditingkat Kabupaten/Kota. Selain itu pembiayaan juga berasal dari anggota fraksi, calon legislatif maupun kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan di Solo Raya.

Dibawah ini pola pembiayaan gotong royong PDI Perjuangan Karesidenan Surakarta;

Gambar 3.1 Sumber Pembiayaan Karesidenan Surakarta



Sumber: diolah peneliti dari hasil interview tahun 2019.

b. Karesidenan Pati

Tim pemenangan di Kabupaten Pati dalam Pemilu Jawa Tengah tahun 2018 juga menggunakan asas dan pola gotong royong oleh kader PDI Perjuangan yang merasa memiliki partai. Hal ini dilakukan tim pemenangan Kabupaten Pati untuk meringankan beban biaya Pemilu yang tidak menelan biaya sedikit. Dalam melaksanakan pola tersebut PDI Perjuangan kabupaten pati melaksanakan rapat konsolidasi terlebih dahulu untuk melaksanakan musyawarah dengan hasil yang mufakat.

Seperti yang dilansir dalam interview dengan ketua tim pemenangan Kabupaten Pati, Ali Badrudin di Banyumas pada tanggal 9 Februari 2019 menyatakan;

“Dalam pembiayaan Pemilu tahun 2018 untuk pemenangan Pilgub Pak Ganjar dan Gus Taj Yasin adalah pola Gotong Royong, yang mana kami sebelum memutuskan kebijakan, kami melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh pengurus DPC, kemudian fraksi PDI Perjuangan, para ketua PAC dan ketua-ketua organisasi sayap partai”

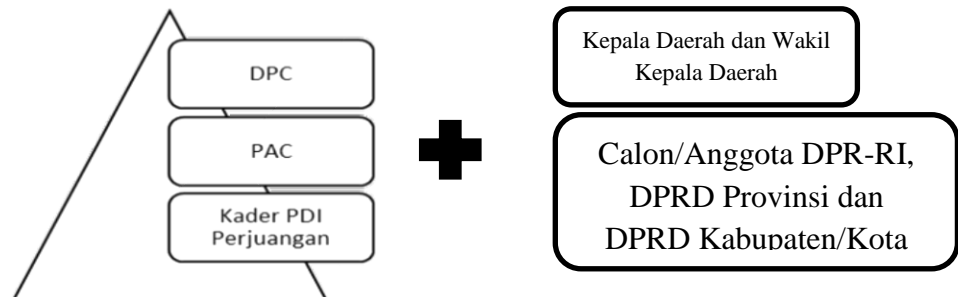
Dalam rapat tersebut membahas tentang pembiayaan pemenangan Pemilu yang menggusung Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen yang mana diputuskan untuk Kabupaten Pati melaksanakan Pola Gotong Royong dalam proses pembiayaan pemenangan Pemilu Jawa Tengah tahun 2018. Sumber pembiayaan dalam pemenangan

Pemilukada, tim pemenangan Kabupaten Pati bersumber dari Kepala Daerah, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan kader PDI Perjuangan yang peduli terhadap gotong royong untuk membesarkan PDI Perjuangan yang dalam hal ini untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen.

Pola Gotong Royong memiliki variasi namun memiliki sumber pembiayaan yang sama, tim pemenangan Kabupaten Pati dalam pembekalan dan penugasan saksi memiliki sumber pembiayaan yang mirip-mirip dengan karesidenan daerah lain di Jawa Tengah. Pembiayaan tersebut selanjutnya dikelola secara gotong royong dimana porsi DPR-RI dan DPRD Provinsi adalah 40% dari total biaya, dan DPRD Kabupaten beserta kader PDI Perjuangan yang peduli terhadap gotong royong sebesar 60% dari total pembiayaan. Setelah ditentukan dalam rapat konsolidasi maka akan diakumulasikan total berapa biaya yang harus dikeluarkan tim pemenangan Pati dalam Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018.

Dibawah ini pola pembiayaan gotong royong PDI Perjuangan Karesidenan Pati;

Gambar 3.2 Sumber Pembiayaan Karesidenan Pati



Sumber: diolah peneliti dari hasil interview tahun 2019.

c. Karesidenan Semarang

Sumber pembiayaan karesidenan Semarang Raya berasal dari Gotong Royong PDI Perjuangan yang tersebar di lima daerah tiga kabupaten (Semarang, Kendal, Demak) dan dua kota (Semarang dan Salatiga). Lima daerah tersebut melaksanakan pembiayaan gotong royong dalam pemenangan Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018 yang berguna untuk membiayai segala kegiatan atau agenda politik.

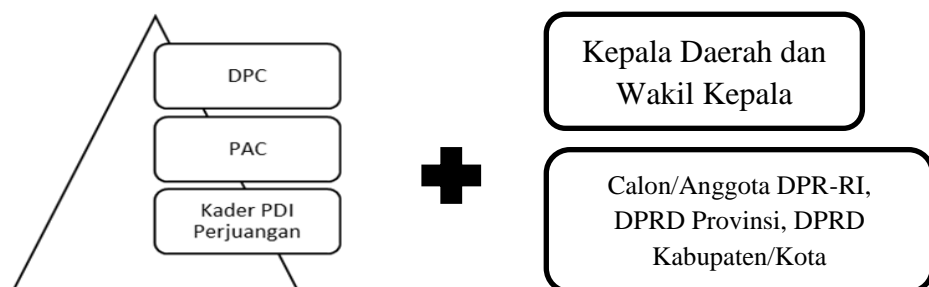
Terdapat perbedaan antara pembiayaan gotong royong Karesidenan Semarang Raya dengan Solo Raya yakni dalam struktural kader PDI Perjuangan yang duduk dikursi Legislatif maupun Eksekutif. Semarang Raya memiliki kepala daerah yang berasal dari kader PDI Perjuangan hanya di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang namun dalam skema gotong royong Semarang Raya memiliki pola yang sama dengan Karesidenan lain di Jawa Tengah.

Tim Pemenangan Semarang Raya yang diketuai oleh Hendrar Prihadi adalah kader PDI Perjuangan yang duduk dikursi eksekutif sebagai Walikota Semarang. Semarang Raya dalam pola pembiayaan gotong royong memiliki sumber pembiayaan dari DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan juga tambahan pembiayaan yang bersumber dari kepala daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.

Sumber pembiayaan yang lain berasal dari DPC, PAC, Ranting maupun anak ranting yang peduli terhadap gotong royong. Dana yang terkumpul dimasukkan kedalam rekening khusus yang nantinya dilaporkan kepada KPU sebagai dokumen LPSDK dimana nominal yang diberikan setiap penyumbang tidak melebihi batasan yang sudah ditentukan oleh KPU.

Dibawah ini pola pembiayaan gotong royong PDI Perjuangan Karesidenan Semarang;

Gambar 3.3 Sumber Pembiayaan Karesidenan Semarang



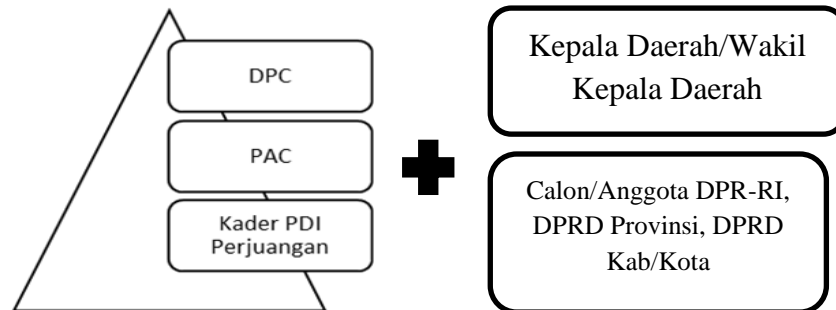
Sumber: diolah peneliti dari hasil interview tahun 2019.

d. Karesidenan Pekalongan

Pekalongan merupakan salah satu daerah karesidenan di Jawa Tengah yang memiliki kontribusi dalam pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen. Selain menjadi ujung paling barat di Jawa Tengah, Pekalongan merupakan daerah yang bisa dikatakan memiliki pengaruh Pantura sebelah barat yang jika ditarik lurus ketimur akan bertemu dengan karesidenan Semarang dan Karesidenan Pati yang menjadi pengaruh Pantura Barat dan Pantura Timur dikaresidenan Pati hingga perbatasan Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Timur. Dalam proses pembiayaan Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018, Pekalongan Raya memiliki mekanisme yang sama dalam proses pembiayaan yakni dengan mekanisme gotong royong.

Mekanisme pembiayaan gotong royong di Karesidenan Pekalongan Raya memiliki sumber pembiayaan yang berasal sebagian dari Legislatif baik tingkat pusat, provinsi hingga tingkat ketinggian kabupaten/kota. Selain itu Tim Pemenangan Pekalongan juga menerima bantuan pembiayaan secara gotong royong dari masing-masing kepala daerah atau wakil kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota di Karesidenan Pekalongan. Bantuan pembiayaan juga datang dari DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah berupa alat peraga kampanye yang tidak melanggar aturan yang sudah diatur dalam KPU.

Gambar 3.4 Sumber Pembiayaan Karesidenan Pekalongan



Sumber: diolah oleh peneliti dari hasil interview tahun 2019.

e. Karesidenan Kedu

Tim Pemenangan Karesidenan Kedu memiliki tekad dan kemauan kuat untuk meraih simpati dari masyarakat Kedu Raya untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen dalam Pemilu Jawa Tengah tahun 2018. Tim Pemenangan Kedu Raya melaksanakan rapat konsolidasi untuk memenangkan pemilu dengan biaya yang sangat efisien dengan tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah diatur oleh KPU. Hal pertama yang dilakukan adalah menyatukan frame masing-masing anggota tim dengan melakukan rapat konsolidasi ditingkat karesidenan.

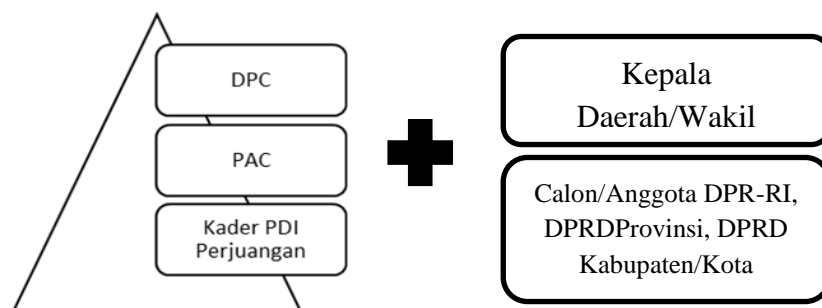
Kedu Raya melaksanakan pola gotong royong yang nantinya digunakan untuk pengumpulan pembiayaan kemenangan pemilu Jawa Tengah tahun 2018. Pola gotong royong yang dilaksanakan di Kedu Raya sama dengan pola yang dilaksanakan dikaresidenan lain yang ada di Jawa Tengah yakni, pembiayaan gotong royong yang berasal dari DPC, PAC bahkan Ranting dan Anak Ranting sekalipun.

Pembiayaan gotong royong di Kedu Raya juga dibiayai oleh kader PDI Perjuangan yang berada Legislatif dan Eksekutif baik itu Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang daerah pemilihanya Kedu Raya.

Dari segi pembiayaan gotong royong oleh eksekutif di Karesidenan Kedu Raya memiliki satu Kota Magelang dan lima Kabupaten yakni Magelang, Purworejo, Temanggung, Kebumen, Wonosobo. Dari ke enam daerah kabupaten/kota, Karesidenan Kedu memiliki 5 kepala daerah yang menjadi Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang juga bersama-sama ikut melaksanakan pola gotong royong dalam pembiayaan pemenangan Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018 atas pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen.

Dibawah ini pola pembiayaan gotong royong PDI Perjuangan Karesidenan Kedu;

Gambar 3.5 Sumber Pembiayaan Karesidenan Kedu



Sumber: diolah oleh peneliti dari hasil interview tahun 2019.

f. Karesidenan Banyumas

Menghadapi Pemilu tahun 2018 karesidenan Banyumas di beberapa daerah melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rakorcab yang juga dihadiri oleh tiga wakil ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara adalah salah satu daerah yang melaksanakan Rakercab guna membahas Pemilu tahun 2018 dan persiapan Pemilu tahun 2019. Dalam skema pembiayaan Pemilu Jawa Tengah tahun 2018, Tim Pemenangan Banyumas Raya memiliki plot-plot anggaran yang dibiayai secara gotong royong. Gotong royong ini dilakukan untuk meringankan yang semula berat, sama artinya dengan meringankan beban biaya Pemilu yang sangat besar.

Banyak sekali kegiatan atau aktivitas politik yang dilakukadin sebelum dan menjelang dilaksanakannya Pemilu, maka membutuhkan biaya yang banyak juga untuk membiayai kegiatan atau aktivitas politik tersebut. Banyumas Raya menggunakan sistem gotong royong untuk kemandirian kerja partai, dimana sumber pembiayaan gotong royong di Banyumas Raya melalui DPC masing-masing Kabupaten hingga ketingkat terbawah yakni Ranting. Pembiayaan selanjutnya bersumber dari kursi Legislatif dan Eksekutif yang merupakan kader PDI Perjuangan daerah pemilihan Banyumas Raya.

Karesidenan Banyumas terbagi menjadi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara dimana dari empat kabupaten tersebut PDI Perjuangan memiliki empat kader yang saat ini duduk dikursi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sumber pembiayaan gotong royong Banyumas Raya juga berasal dari kader-kader PDI Perjuangan yang berada dikursi eksekutif. Oleh karena itu pola pembiayaan gotong royong yang dilaksanakan PDI Perjuangan diwilayah Banyumas Raya memiliki kesamaan dengan karesidenan lain diseluruh Provinsi Jawa Tengah.

Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018 PDI Perjuangan mengusung Ganjar-Yasin merupakan sebuah perintah dan instruksi partai baik dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Perintah dan instruksi diberikan keseluruh DPC di Jawa Tengah untuk melakukan Gotong Royong dalam memenangkan Ganjar-Yasin. Ketua Tim Pemenangan Banyumas melaksanakan pola gotong royong dalam pembiayaan pemenangan Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018.

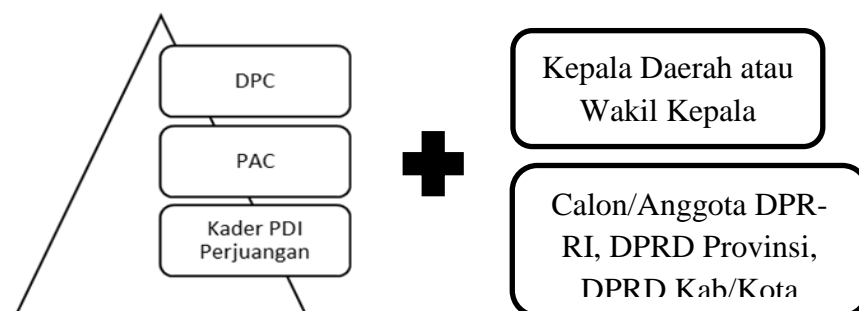
Dari hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi diputuskan bahwa setiap calon legislatif, anggota dewan yang berada ditingkat pusat, provinsi ataupun kabupaten juga peduli dan melaksanakan pola gotong royong. Pola gotong royong ini dilakukan untuk pemenangan pasangan Ganjar-Yasin, selain pihak Legislatif, DPC Banyumas juga melaksanakan gotong royong sampai ketinggian ranting dengan dasar

kepedulian terhadap partai. Sehingga saat melaksanakan sosialisasi maupun gerakan-gerakan dilapangan ini semuanya terarah kepada pemenangan Gotong Royong.

DPC Kabupaten Banyumas melaksanakan gotong royong dengan iuran anggota yang tidak bersifat mengikat maupun menekan yang nantinya dana gotong royong ini digunakan untuk mobilisasi petugas tingkat DPC, PAC ataupun ranting dalam rangka pemenangan Ganjar-Yasin. Jadi dapat dikatakan petugas partai ditingkat DPC, PAC, Ranting semua gotong royong baik dengan uang tunai, tenaga maupun pemikiran yang tidak mengikat atau membebankan anggota/kader PDI Perjuangan hal tersebut dijelaskan melalui Interview via *Whatsapp Call* dengan ketua DPC PDI Perjuangan Banyumas Dr. Budhi Setiawan pada tanggal 15 Februari 2019.

Dibawah ini pola pembiayaan gotong royong PDI Perjuangan Karesidenan Banyumas;

Gambar 3.6 Sumber Pembiayaan Karesidenan



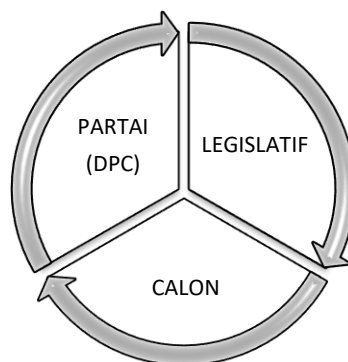
Sumber: diolah oleh peneliti dari hasil interview tahun 2019

Dapat dijelaskan bahwasanya Pembiayaan Gotong Royong ini bukan iuran antar anggota, namun pelaksanaan kegiatan ataupun aktivitas politik dalam rangka pemenangan Ganjar-Yasin yang dibiayai secara mandiri dimasing-masing pelaksana atau tim pemenangan. Dengan panjangnya proses pemilukada dan banyaknya kegiatan politik akan berdampak pada besarnya biaya yang harus ditanggung.

Dengan demikian Pola pembiayaan gotong royong PDI Perjuangan sebagai solusi dalam pemenangan Ganjar-Yasin adalah Gotong Royong yang dilaksanakan secara mandiri dalam setiap kegiatan dan aktivitas politik dimasing-masing tim pemenangan Ganjar-Yasin. Pola Pembiayaan Gotong Royong yang tidak bersifat mengikat namun rasa kepedulian dan kepemilikan partai, biaya yang besar dan proses pemilukada yang begitu panjang akan terasa ringan dengan Gotong Royong.

BAGAN 3.1

Sumber Pembiayaan Gotong Royong Tiga Pilar Partai



Sumber: Instruksi Gotong Royong diolah oleh peneliti tahun 2019

Secara garis besar, pola pembiayaan gotong royong PDI Perjuangan dalam Pemenangan Pemilu Jawa Tengah tahun 2018 dapat dijelaskan mengenai Tiga Pilar Partai harus bersinergi dan bergotong royong. Instruksi melalui forum *Legislator Summit* langsung dilaksanakan dan menjadi penugasan bagi setiap pimpinan cabang PDI Perjuangan untuk tegak lurus melaksanakan instruksi partai yakni gotong royong untuk memenangkan pasangan Ganjar-Yasin dalam Pemilu Jawa Tengah tahun 2018.

3.1.2. Bentuk Pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

a. Karesidenan Surakarta

Bentuk pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan khususnya dalam Pemilu Jawa Tengah tahun 2018 yang paling utama adalah pembiayaan dalam bentuk atribusi seragam untuk saksi, regu penggerak pemilih (Guraklih), Komunitas Juang, Kawan Suluh Perjuangan yang didapatkan secara “urunan” atau Gotong Royong dari masing-masing calon anggota legislatif dan anggota fraksi atau kader yang lain. Selain dalam bentuk atribusi berupa kaos, pamphlet (MMT) dan kegiatan politik yang lain yang tidak melanggar peraturan KPU.

Bentuk pembiayaan khusus saksi terdapat pemberian tambahan bantuan dari DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah yang dimana kekurangannya dicukupi atau ditambah oleh tim pemenangan dimasing-masing daerah melalui skema pembiayaan Gotong Royong. Hal ini murni dilakukan untuk mendukung dan melaksanakan instruksi partai untuk saling bantu-binantu dalam proses pembiayaan pemenangan Pemilu Jawa Tengah tahun 2018. Menurut ketua tim pemenangan Solo Raya FX. Hadi Rudyatmo yang terpenting adalah bagaimana untuk bisa memenangkan pasangan Ganjar-Yasin sesuai dengan target perolehan suara dengan porsi biaya seefisien mungkin.

b. Karesidenan Pati

Tim pemenangan Pati Raya mengatur dan manajemen pembiayaan Gotong Royong secara mandiri oleh bendahara partai yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan kegiatan atau aktivitas politik PDI Perjuangan dalam proses pemenangan Pemilu. Bentuk pembiayaan yang dilakukan adalah iuran sejumlah uang yang nantinya akan disetorkan kepada rekening khusus yang bernama dokumen Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), selain uang tunai terdapat bentuk pembiayaan seperti seragam untuk saksi dan alat peraga kampanye dari DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Sumbangan iuran dana dengan pola Gotong Royong ini dilaksanakan oleh kader PDI Perjuangan yang berada di DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan seluruh kader PDI Perjuangan yang peduli dengan Gotong Royong. Bentuk pembiayaan ini dilakukan dengan mengirimkan sejumlah uang dengan transfer kepada Rekening Khusus yang dikelola dengan manajemen structural bendahara partai. Bentuk pembiayaan ini nantinya berupa rekening khusus yang terlapor kepada KPU dalam dokumen LPSDK.

c. Karesidenan Semarang

Semarang merupakan daerah yang menjadi Ibukota Provinsi Jawa Tengah sudah semestinya dalam proses pembiayaan pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen. Seluruh kantor dan badan pemenangan tingkat provinsi berada di Karesidenan Semarang tepatnya di Kota Semarang, oleh sebab itu bentuk-bentuk pembiayaan di Karesidenan Semarang tidak berbeda dengan Karesidenan yang lain di Jawa Tengah. Selain kantor DPD PDI Perjuangan, kantor-kantor organisasi sayap partai juga berada dipusat Ibu Kota Jawa Tengah tepatnya di Kota Semarang, seperti Kantor Banteng Muda Indonesia (BMI), Derap Juang, Komunitas Juang dan yang lainnya.

Bentuk pembiayaan gotong royong di Karesidenan Semarang dapat berupa sejumlah uang yang berasal dari anggota fraksi PDI Perjuangan yang berada ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu Tim Pemenangan Semarang Raya yang diketuai oleh Hendrar Prihadi yang juga selaku Walikota Semarang juga mendapatkan bentuk bantuan pembiayaan dari Eksekutif baik itu kepala daerah atau wakil kepala daerah di Karesidenan Semarang. Tim Pemenangan Semarang Raya juga menerima bentuk bantuan pembiayaan berupa alat peraga kampanye yang berasal dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah.

Alat peraga kampanye yang diberikan sebagai bantuan pembiayaan dari DPD PDI Perjuangan tentu tidaklah langsung bisa mencukupi untuk seluruh Karesidenan Semarang. Oleh sebab itu pembiayaan gotong royong yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Semarang Raya dilaksanakan untuk menutupi kekurangan dalam pendistribusian alat peraga kampanye yang pengaturannya sesuai mandat dari KPU. Bantuan diluar pihak keanggotaan PDI Perjuangan semuanya termuat dalam LPSDK sebagai dokumen resmi yang dilaporkan ke KPU sebagai wujud pertanggungjawaban.

d. Karesidenan Pekalongan

Tim pemenangan Ganjar – Yasin Pekalongan Raya menerima pembiayaan gotong royong yang berupa sejumlah uang yang dikumpulkan dalam sebuah rekening khusus dalam dokumen LPSDK. Penerimaan sumbangan dana kampanye ini didasarkan pada semangat PDI Perjuangan dalam meraih kemandirian partai dalam hal pembiayaan. Pekalongan Raya merupakan daerah yang berpengaruh dalam Pemilu Jawa Tengah khususnya pengaruh Pantura Barat. Selain berbentuk uang bentuk pembiayaan gotong royong yang lain adalah pembiayaan mandiri disetiap agenda kepartaian di Pekalongan Raya.

Selain itu Tim Pemenangan Pekalongan Raya juga mendapatkan bentuk bantuan pembiayaan dari Eksekutif baik itu kepala daerah atau wakil kepala daerah di Karesidenan Pekalongan. Tim Pemenangan Pekalongan Raya juga menerima bentuk bantuan pembiayaan berupa alat peraga kampanye yang berasal dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah. Bentuk pembiayaan secara gotong royong yang lain adalah pembiayaan mandiri setiap kegiatan politik yang berada ditingkat kecamatan atau bahkan tingkat yang secara mandiri dibiayai oleh PAC ataupun Ranting.

e. Karesidenan Kedu

Tim Pemenangan Ganjar – Yasin di Kedu Raya menerima bentuk pembiayaan yang tidak melanggar ketentuan yang telah diatur KPU, pembiayaan gotong royong di Kedu Raya berbentuk pengumpulan uang yang disetorkan dalam rekening khusus dan dikelola bendahara partai. Kedu Raya memiliki lima kader PDI Perjuangan yang duduk dikursi eksekutif, yang secara langsung melakukan gotong royong sebagai bentuk kepedulian terhadap partai. Selain dari Eksekutif bentuk pembiayaan juga diberikan oleh kader PDI Perjuangan yang berada di Legislatif.

Anggota legislatif baik dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota turut serta melakukan gotong royong dalam bentuk pembiayaan pemilukada Jawa Tengah. Besaran jumlah pembiayaan tidak ditentukan dan tanpa penekanan, pola gotong royong PDI Perjuangan dilakukan sebagai perwujudan kepedulian dan rasa memiliki terhadap partai. Oleh karena itu seluruh daerah di Karesidenan Kedu Raya secara gotong royong dan mandiri mencukupi kebutuhan biaya masing-masing agenda hingga ketingkat PAC ataupun Ranting.

Bentuk pembiayaan yang lain adalah bantuan alat peraga kampanye yang berasal dari DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, namun dalam pendistribusianya pembiayaan gotong royong inilah

yang digunakan untuk menutupi kekurangannya. Selain dengan iuran, pola Gotong Royong dilaksanakan dengan membuat atribusi kaos dari konveksi swasta bergambar Ganjar-Yasin sejumlah 10.000 buah.

Gotong Royong ini dilakukan dengan mengindahkan peraturan KPU, dimana total pembuatan kaos menghabiskan biaya Rp. 200.000.000,00. Jumlah ini tidak melanggar peraturan dari KPU dikarenakan batasan sumbangan yang berasal dari pihak swasta memiliki batasan atau tidak melebihi Rp. 750.000.000,00, sehingga pola Gotong Royong dalam bentuk atribusi sesuai dan tidak melanggar ketentuan KPU yang berlaku.

f. Karesidenan Banyumas

Tim pemenangan Banyumas dalam melaksanakan pembiayaan gotong royong menggunakan bentuk iuran uang tunai, sumbangan lain berupa pikiran dan tenaga yang dikerahkan semua dalam pemenangan pemilukada Jawa Tengah tahun 2018. Bentuk pembiayaan uang tunai diberikan melalui rekening khusus yang disimpan dalam kas partai yang selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan atau aktivitas politik yang mengarah kepada pemenangan Ganjar-Yasin.

Selain dari DPC bentuk pembiayaan yang lain berasal dari bantuan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah yang berupa alat peraga kampanye untuk didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh KPU. Mekanisme gotong royong juga dilaksanakan dalam

pendistribusian alat peraga kampanye ini kesuluruh daerah-daerah di Banyumas, tentu biaya operasional petugas akan digotong royong secara mandiri oleh pimpinan-pimpinan anak cabang yang bertanggung jawab kepada masing-masing wilayahnya. Bentuk pembiayaan selanjutnya akan dibahas ditingkat DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Tim Pemenangan Ganjar-Yasin ditingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dengan penjelasan bentuk-bentuk pembiayaan ditingkat Karesidenan diseluruh Jawa Tengah, dapat dijelaskan kedalam tabel dibawah ini supaya lebih memudahkan untuk memahami bentuk pembiayaan dimasing-masing Karesidenan di Jawa Tengah, berikut tabel bentuk pembiayaan gotong royong;

Tabel 3.2

Bentuk Pembiayaan Gotong Royong Masing-masing Karesidenan diseluruh Jawa Tengah

No	Karesidenan	Bentuk Pembiayaan	Sumber Pembiayaan
1	Surakarta	a. Uang Tunai (<i>Cash Money</i>) b. Seragam Saksi dan Kaos c. Alat Peraga Kampanye	Gotong Royong
2	Semarang	a. Uang Tunai (<i>Cash Money</i>) b. Seragam Saksi dan Kaos c. Alat Peraga Kampanye	Gotong Royong
3	Kedu	a. Uang Tunai (<i>Cash Money</i>) b. Seragam Saksi dan Kaos c. Alat Peraga Kampanye	Gotong Royong

4	Banyumas	a. Uang Tunai (<i>Cash Money</i>) b. Seragam Saksi dan Kaos c. Alat Peraga Kampanye	Gotong Royong
5	Pekalongan	a. Uang Tunai (<i>Cash Money</i>) b. Seragam Saksi dan Kaos c. Alat Peraga Kampanye	Gotong Royong
6	Pati	a. Uang Tunai (<i>Cash Money</i>) b. Seragam Saksi dan Kaos c. Alat Peraga Kampanye	Gotong Royong

Sumber: diolah oleh peneliti

3.2. Penggunaan Pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018.

3.2.1 Mekanisme Penggunaan Pembiayaan Gotong Royong dalam Pemenangan Pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen

Badan Saksi Pemilu Nasional atau yang selanjutnya disingkat menjadi BSPN merupakan Badan Saksi yang dimiliki oleh PDI Perjuangan yang bertugas menjadi saksi-saksi dalam pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Khusus dalam pemilukada Jawa Tengah tahun 2018, BSPN dibiayai oleh pasangan calon yakni Ganjar-Yasin. Maksud dibiayai disini bukan ditanggung atau dibebankan dengan pasangan calon namun oleh kepala BSPN ditanyakan kemampuan calon atau pasangan calon untuk membiayai saksi atau BSPN.

Data menyebutkan dalam pemilukada Jawa Tengah terhitung ada 138.224 saksi yang bertugas di 63.973 Tempat Pemungutan Suara (TPS).Rinciannya, setiap TPS ada 2 saksi yang dikoordinatori oleh satu koordinator desa (kordes). Total kordes di Jateng ada 8.559 orang. Angka itu masih ditambah 3 saksi di setiap PPK. Jawa Tengah memiliki 573 Kecamatan, kebutuhan saksi guna memenuhi seluruh PPK berjumlah total 1.719.

Hasil ini dipaparkan langsung oleh Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam Rakorda BSPN yang bertempat di Panti Marhen. Dari angka tersebut, setidaknya butuh Rp 15 miliar untuk honor seluruh saksi dan kordes, dan 20 Miliar tambahan lagi untuk biaya pelatihan seluruh saksi atau BSPN.

Dengan kata lain dalam pemilukada Jawa Tengah untuk pembiayaan saksi sendiri menelan anggaran sekitar 35 Miliar. Oleh karena itu kesiapan dan kesanggupan calon atau pasangan calon dalam membiayai total keseluruhan biaya saksi, namun melihat data LHKPN Ganjar-Yasin yang dilansir dari KPK tahun 2018 maka sangat tidak mungkin pasangan Ganjar-Yasin dengan total kekayaan yang dimiliki mampu membiayai saksi.

1. LHKPN Calon Gubernur Jawa Tengah

Bidang	: Eksekutif
Lembaga	: KPUD (Calon Kepala Daerah)
Unit Kerja	: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Nama	: Ganjar Pranowo
Jabatan	: Calon Gubernur
NHK	: 35301
Data Harta	: Rp. 6.729.155.082
Disahkan	: 15 Februari 2018

Sumber : LHKPN KPK Tahun 2018

2. LHKPN Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah

Bidang	: Eksekutif
Lembaga	: KPUD (Calon Kepala Daerah)
Unit Kerja	: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Nama	: Taj Yasin
Jabatan	: Calon Wakil Gubernur
NHK	: 400604
Data Harta	: Rp. 3.061.935.581
Disahkan	: 19 Februari 2018

Sumber : LHKPN KPK Tahun 2018

Oleh karena itu tim pemenangan Ganjar-Yasin tidak melakukan penekanan jumlah, akan tetapi kesanggupan yang dimiliki oleh pasangan Ganjar-Yasin untuk mengeluarkan biaya dasar pertama lantas kekurangan dari biaya yang sudah dikeluarkan Ganjar-Yasin

akan dimaksimalkan untuk mencapai angka 35 Miliar melalui pembiayaan Gotong Royong. Pembiayaan Gotong Royong dilakukan oleh berbagai pihak seperti Gotong Royong dari anggota DPR-RI, Gotong Royong dari anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPC diseluruh Jawa Tengah serta dari DPD ditingkat provinsi.

Dalam bahasa politik kepala BSPN PDI Perjuangan Jawa Tengah menyatakan dalam interview yang dilaksanakan di JiExpo Kemayoran pada tanggal 9 Januari 2019;

“seluruh biaya saksi akan dibebankan kepada paslon, namun apakah paslon akan mampu mengeluarkan biaya segitu? Jawabanya tidak, namun biaya yang dikeluarkan sesuai kemampuan paslon berapa kita maksimalkan dengan Gotong Royong, jika ada yang mengatakan calon/pasangan calon tidak punya duit kita harus Gotong Royong, secara politik itu tidak benar dan kurang bagus, karena PDI Perjuangan adalah partai yang terbiasa dengan Gotong Royong dalam aktivitas pembiayaan pemilihan umum”

Gotong Royong sangat jelas dilakukan dalam pemilukada Jawa Tengah tahun 2018, dalam hal pembiayaan saksi sudah terlihat Gotong Royong yang dilakukan dimana Tim tidak menekankan jumlah biaya kepada paslon akan tetapi murni kesanggupan dari tiap-tiap calon yang nantinya kekurangan dari jumlah kedua calon akan digenapi dengan pembiayaan secara Gotong Royong.

Kepala BSPN atau kepala saksi PDI Perjuangan Jawa Tengah memiliki tugas dasar yakni:

1. Merekrut anggota BSPN yang berasal dari seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Tengah
2. Melakukan pelatihan bagi anggota BSPN seperti pelatihan terkait saksi dan pemilihan umum
3. Menempatkan ditiap masing-masing TPS sesuai domisili alamat anggota BSPN
4. Menyiapkan biaya pembekalan BSPN atau saksi pemilihan umum (Pemilu)
5. Menyiapkan surat mandat yang nantinya diberikan saksi untuk dibawa ke TPS
6. Menyiapkan tata cara dan sistem penghitungan hasil rekapitulasi suara pemilihan umum (Pemilu) cepat yang lengkap dengan bukti C1, Foto dan hasil rekapitulasi dari TPS ketingkat desa lalu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai ke Jawa Tengah
7. Menyiapkan honor bagi seluruh saksi atau anggota BSPN yang bertugas dalam pemilihan umum (Pemilu)

Praktek dari pembiayaan Gotong Royong untuk membiayai saksi ini dimisalkan dalam suatu daerah kabupaten, dimana tiap-tiap kabupaten yang kepala daerahnya merupakan kader dari PDI Perjuangan maka akan diinstruksikan oleh partai untuk membantu pembiayaan saksi sesuai kemampuan masing-masing kepala daerah

dengan ketentuan sumbangan yang sesuai dengan peraturan KPU tentang batasan sumbangan politik.

PDI Perjuangan memiliki 19 kader yang kepala daerah di Jawa Tengah, selanjutnya bantuan bisa berasal dari ketua DPRD tiap kabupaten/kota yang juga diinstruksikan untuk gotong royong membantu membiayai saksi di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah dan langsung dilaporkan kepada KPU sebagai bentuk akuntabilitas partai dalam hal sumbangan pembiayaan pemilu yang termaktub dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Gotong Royong merupakan hal yang biasa dilakukan PDI Perjuangan, hal ini dilakukan untuk meringankan beban biaya pemilu yang harus ditanggung oleh paslon hasil kesepakatan partai. Salah satu fakta pola gotong royong ini dilakukan tidak hanya bagi kepala daerah ataupun ketua DPRD saja, namun menyeluruh dan tidak bersifat memaksa kepada seluruh anggota/kader PDI Perjuangan. Salah satu kader PDI Perjuangan yang beralamat di Kota Semarang melakukan Gotong Royong dengan menyumbangkan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,00 yang diserahkan melalui rekening khusus dan dikelola oleh bendahara tim kampanye Ganjar-Yasin. Seluruh kader/anggota PDI Perjuangan yang melakukan pola pembiayaan Gotong Royong murni bersifat untuk membantu membesarkan dan meringankan beban partai dalam setiap aktivitas pemilu.

Hal ini akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat umum terkait imbal budi dari Paslon Ganjar-Yasin setelah terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, namun dalam PDI Perjuangan gerakan gotong royong memang sudah menjadi jalan maupun perpanjangan nafas bagi partai untuk saling bantu-binantu meringankan beban sesama anggota PDI Perjuangan. Kader PDI Perjuangan hampir semuanya memiliki ideologi yang sama terkait jiwa kegotong royongan, dalam wawancara kepada salah satu kader yang ikut menyumbang memiliki jawaban khusus yang tidak mengarah kepada imbal budi setelah melakukan Gotong Royong namun murni untuk membantu tanpa mengharap imbal budi. Dalam jawabannya mengatakan :

“Karma Nevad Ni Adikaraste Ma Phalesu Kada Chana kerjakanlah kewajibanmu dengan tidak menghitung-hitungkan akibatnya! kalau sudah niat untuk bergotong royong ya sudah, mas Ganjar mengetahui atau tidak bukan persoalan yang besar bagi saya”

Pola Gotong Royong yang dilakukan oleh anggota perseorangan ataupun yang memiliki usaha dibidang swasta sama-sama memiliki tujuan untuk memenangkan pasangan Ganjar-Yasin. Jika timbul pertanyaan yang sama terkait imbal budi apa yang diminta oleh para penyumbang masing-masing memiliki jawaban yang sama yakni memiliki harapan kepada Ganjar-Yasin menjadi pemenang dipemilukada, menjadi seorang pemimpin yang baik, kebijakan maupun keputusan yang dikeluarkan murni untuk mensejahterakan

masyarakat Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan PDI Perjuangan memiliki kader-kader ideologis dimana dijelaskan :

“kalau mau memahami betul ya harus menjadi orang partai, bahwasanya partai yang didukung itu menang sudah merupakan kebanggaan, pemilukada menang itu merupakan kepuasan yang tidak bisa dibayar dengan finansial, kalau sampai partainya kalah itu wirangnya seumur-umur, kita ini yang sudah mendalami ideologinya, kecintaanya kepada PDI Perjuangan kadang kala melebihi terhadap cintanya akan kebutuhan pribadinya”

Dapat dikatakan Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan merupakan badan partai yang bertugas saat pelaksanaan pemilu, dalam hal sistem penghitungan cepat, mengumpulkan data dari setiap TPS, pengumpulan bukti-bukti hasil rekapitulasi suara dan bertugas untuk mewakili calon ataupun partai didalam rekapitulasi hasil pemilihan di KPUD Jawa Tengah sekaligus dapat dikatakan BSPN merupakan penghubung partai dengan Bawaslu, KPU, Polda Jawa Tengah, Kesbangpol dan Linmas dimana dalam setiap menjalankan tugasnya BSPN membutuhkan biaya dimasing-masing petugas, jadi dapat disimpulkan biaya 35 Miliar merupakan biaya yang dibutuhkan untuk membiayai BSPN dalam menjalankan berbagai tugasnya dalam Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018.

a. Karesidenan Surakarta

Dalam perjalanan proses pemenangan Ganjar-Yasin di Solo Raya penggunaan pembiayaan Gotong Royong dilakukan setelah terlaksananya Rakerdasus di Semarang. Instruksi gotong royong untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik yang tidak melanggar peraturan Pemilu dari KPU. Penggunaan itu berupa pelaksanaan Rakercabsus ditingkat Kabupaten/Kota, pembelian atribut kampanye seperti kaos, topi, stiker ataupun alat peraga kampanye yang lain. Selain itu untuk menghemat penggunaan pembiayaan pelaksanaan rapat konsolidasi tidak dilaksanakan ditempat yang mewah dan menghabiskan uang banyak, bahkan konsumsi yang diberikan cukup segelas air mineral dan roti/gorengan.

Selain yang disebutkan di atas penggunaan pembiayaan gotong royong terdapat juga penggunaan pembiayaan gotong royong untuk (Rakercabsus) ditingkat DPC bagi internal PDI Perjuangan. Selain Rakercabsus penggunaan lain seperti deklarasi pemenangan Ganjar-Yasin dan rapat-rapat koordinasi yang dilakukan bersama partai koalisi baik ditingkat kabupaten/kota sampai ketingkat PAC atau kecamatan.

Selain itu pembiayaan gotong royong juga digunakan untuk pembekalan saksi, pelatihan dan pelaksanaannya nanti dilapangan. Dalam penugasan kader Komunitas Juang yang memerlukan biaya juga diakumulasikan dalam penggunaan pembiayaan ini, juga banyak

untuk penggunaan lain bagi organisasi sayap PDI Perjuangan yang penggunaannya tidak melanggar kaidah pemilu yang sudah diatur oleh KPU.

b. Karesidenan Pati

Tim pemenangan Pati dalam penggunaan pembiayaan Gotong Royong salah satunya adalah digunakan untuk pembiayaan acara Rakercabsus PDI Perjuangan Kabupaten Pati. Selain itu digunakan untuk pembiayaan saksi mulai dari pembekalan hingga honor. Dalam PDI Perjuangan saksi dikelola oleh suatu Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN), salah satu bentuk penggunaan biaya Gotong Royong adalah untuk membiayai saksi-saksi pemilu disetiap TPS di Kabupaten Pati.

Dalam pembiayaan saksi Tim Pemenangan Pati mendapatkan bantuan dari DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, akan tetapi belum semua biaya itu terpenuhi. Dengan demikian pembiayaan yang belum terpenuhi akan dipenuhi oleh Tim Pemenangan Pati melalui mekanisme Gotong Royong. Sumbernya berasal dari kepala daerah atau wakil kepala daerah yang juga menjadi tim pemenangan Ganjar-Yasin dalam pilukada dengan besaran yang tidak menekankan kepada para penyumbang.

Penggunaan selanjutnya digunakan untuk membeli *uniform* (seragam) bagi seluruh anggota BSPN, sarana penunjang komunikasi seperti pulsa maupun data internet. Selain itu penggunaan pembiayaan gotong royong digunakan untuk rapat koordinasi, deklarasi Ganjar-Yasin dan membeli tambahan atribut-atribut kampanye yang bergambar Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen, memasang pamphlet (MMT), maupun alat peraga kampanye yang lain yang tidak melanggar peraturan dari KPU.

c. Karesidenan Semarang

Penggunaan pembiayaan gotong royong Tim Pemenangan Semarang Raya digunakan murni untuk semata-mata dalam proses pemenangan Pemilu Jawa Tengah 2018 atas pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen. Dalam proses penggunaannya biaya gotong royong yang telah terkumpul dalam suatu rekening khusus yang dikelola bendahara partai akan digunakan untuk agenda atau kegiatan pemenangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen. Pelaksanaa Rakercabsus menjadi kegiatan pertama yang digelar setelah terlaksananya Rakerdasus ditingkat Provinsi.

Pembuatan seragam atau kaos yang menampilkan foto pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen merupakan penggunaan yang selanjutnya. Selain itu pembiayaan gotong royong juga digunakan untuk membiayai pelaksanaan berbagai acara pertemuan, deklarasi pemenangan Ganjar – Yasin dan rapat

koordinasi, dimana dalam pelaksanaan ini jika mengalami kekurangan dana maka DPC, PAC atau Ranting akan menutup kekurangan pembiayaan tersebut secara gotong royong dan mandiri.

Pelaporan biaya politik selalu dilakukan jika memang itu harus dilaporkan kepada KPU namun ada beberapa pembiayaan yang tidak dilaporkan misalnya snack ataupun konsumsi saat pelaksanaan pertemuan, uang transportasi bagi tim saat melaksanakan sosialisasi atau pendistribusian alat peraga kampanye. Karena akan sangat rumit menghitung pengeluaran "*printilan*" saat pelaksanaan pemenangan PemiluKada dan jumlahnya pun tidak akan melebihi batas yang telah ditentukan KPU.

Penggunaan pembiayaan gotong royong dilakukan atas asas mufakat yang sudah disetujui dalam rapat konsolidasi pertama guna membahas plot-plot anggaran yang nantinya harus dikeluarkan oleh partai untuk menjalankan kegiatan ataupun aktivitas politik yang tidak melanggar aturan KPU. Dengan demikian maka dapat dijelaskan penggunaan pembiayaan gotong royong Semarang Raya memiliki persamaan dengan karesidenan lain di Jawa Tengah yakni, untuk membiayai pemenangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen seefisien dan seminimal mungkin dengan pola gotong royong.

d. Karesidenan Pekalongan

Pekalongan Raya dalam penggunaan pembiayaan gotong royong menitikberatkan tercapainya target dengan penggunaan biaya yang se efisien mungkin. DPC PDI Perjuangan Kota Tegal yang menggelar Rakercabsus untuk konsolidasi pemenangan Pemiluakada Kota Tegal dan Pemiluakada Jawa Tengah. Penggunaan pembiayaan gotong royong dalam melaksanakan acara deklarasi menjadi kegiatan yang selanjutnya dilaksanakan, dalam hal ini DPC PDI Perjuangan Brebes melaksanakan deklarasi.

Penggunaan pembiayaan seperti deklarasi yang dihadiri ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan ini murni dari sumbangan antar anggota ditingkat DPC, PAC ataupun Ranting serta mendapatkan bantuan juga dari kader PDI Perjuangan yang duduk di Eksekutif dan Legislatif. Selain deklarasi pemenangan Ganjar – Yasin, masih banyak penggunaan pembiayaan lainnya. Tim Pemenangan Pekalongan Raya menjelaskan kegiatan atau agenda politik dalam Pemiluakada Jawa Tengah tahun 2018 akan sangat banyak sekali, tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak melanggar kaidah Pemiluakada yang ditentukan KPU.

e. Karesidenan Kedu

Penggunaan pembiayaan gotong royong dalam mekanismenya tentu digunakan untuk kegiatan atau aktivitas politik yang mengarah kepada pemenangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen. Penggunaan pembiayaan gotong royong di Karesidenan Kedu digunakan untuk melaksanakan Deklarasi di tiap-tiap kabupaten dan kota di Karesidenan Kedu. Misalnya seperti di Kabupaten Magelang penggunaan pembiayaan gotong royong untuk Parade Budaya Magelang yang dihadiri Ganjar Pranowo, dimana didalamnya terdapat acara deklarasi pemenangan Ganjar-Yasin.

Selain deklarasi penggunaan pembiayaan gotong royong juga digunakan dalam Rakercabsus khusus untuk pemenangan Ganjar-Yasin masing-masing kabupaten dan kota. DPC PDI Perjuangan Purworejo dalam memenangkan Ganjar-Yasin juga membentuk Posko Tempur yang tersebar diseluruh desa dan kelurahan di Purworejo. Dengan pembentukan posko tempur ini Ganjar-Yasin menang mutlak di 12 Kecamatan, hal ini mudah dilaksanakan karena kader PDI Perjuangan memiliki struktur anggota hingga tingkat desa.

Jadi penggunaan pembiayaan gotong royong di Karesidenan Kedu Raya tidak terlepas dengan agenda pemenangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen. Dengan demikian mekanisme Karesidenan Kedu raya memiliki kesamaan dengan Karesidenan

yang lain dalam penggunaan pembiayaan gotong royong dalam pemenangan Pemilu Jawa Tengah tahun 2018.

f. Karesidenan Banyumas

Penggunaan pembiayaan gotong royong digunakan dalam kegiatan salah satunya yaitu Rakercabsus, mekanismenya jika kegiatan dilaksanakan oleh DPC secara otomatis pembiayaan ditanggung oleh DPC Kabupaten atau Kota diseluruh Banyumas. Dalam pembiayaan yang ditanggung DPC maka dana yang digunakan adalah dana iuran gotong royong dari Kas Partai. Kegiatan Rakercabsus tingkat Kabupaten/Kota salah satunya dilaksanakan di Banyumas sendiri dengan mengundang Ganjar Pranowo untuk hadir dalam rapat tersebut. Ketua DPC Banyumas Dr. Budhi Setiawan mengatakan;

“Pak Ganjar rawuh (hadir) dan juga memberikan sebagian dukungan dana gotong royong yang totalnya mungkin dikisaran yang sama dengan daerah lain yang melaksanakan Rakercab disalah satu hotel di Banyumas, tentu besarnya tidak melanggar aturan yang telah diberikan KPU”

DPC PDI Perjuangan Banyumas dalam mobilisasi petugas partai tentu menggunakan dana yang dikeluarkan melalui kas partai, dimana kas partai merupakan hasil gotong royong setiap anggota yang bersifat tidak mengikat atau menekan. Dana kas partai inilah yang menjadi pembiayaan dalam pemenangan pemilu Jawa Tengah tahun 2018. Instruksi untuk gotong

royong ini juga mematuhi peraturan KPU, yakni dengan memberikan batasan bagi anggota yang ingin gotong royong.

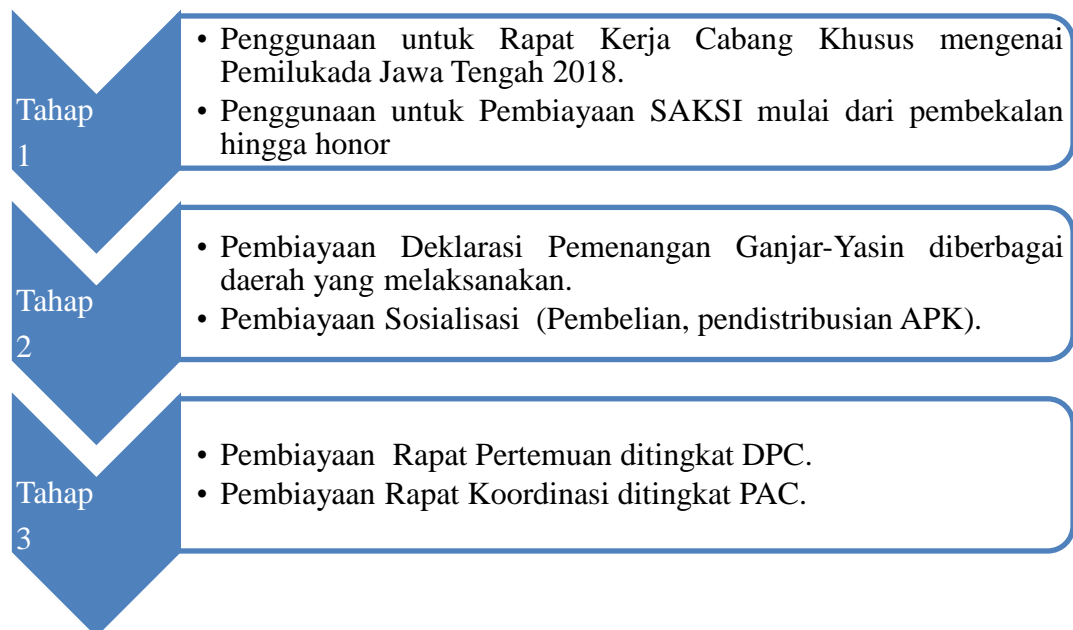
Seluruh kegiatan atau agenda politik patuh terhadap aturan yang dibuat oleh KPU, semua aturan-aturan yang ada di KPU baik tentang kampanye terbuka/tertutup, sosialisasi yang bersifat indoor di dalam gedung wajib patuh aturan KPU. Kegiatan politik yang memerlukan izin kepada panwaslu ataupun pihak yang lain akan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Penggunaan ditingkat cabang menurut ketua DPC PDI Perjuangan Banyumas mengatakan;

“Pembiayaan Gotong Royong sifatnya tidak mengikat, si A harus urun berapa, si B urun berapa, tidak seperti itu. Misalnya dilaksanakan kegiatan pemenangan Ganjar-Yasin ditingkat cabang ya otomatis ketua PAC yang mendanai kegiatan itu diwilayahnya, karena di PDI Perjuangan mengenal sistem Komandante, dimana pemimpin disuatu wilayah akan bertanggung jawab penuh atas daerah wilayahnya”

Dengan demikian dapat dikatakan penggunaan pembiayaan gotong royong murni digunakan untuk pemenangan Ganjar-Yasin, dimana kegiatan yang ditingkat kabupaten dibiayai oleh DPC, dan kegiatan pemenangan ditingkat kecamatan maupun dibawahnya dibiayai secara gotong royong oleh PAC PDI Perjuangan dimasing-masing kecamatan.

Dari penjelasan mengenai penggunaan pembiayaan gotong royong dimasing-masing Karesidenan di Provinsi Jawa Tengah, maka dapat ditarik pokok penggunaan pembiayaan yang dipaparkan dalam bagan dan tabel dibawah ini;

Bagan 3.2 Penggunaan Pembiayaan Gotong Royong



Sumber: diolah peneliti dengan hasil interview.

Penggunaan pembiayaan gotong royong dilaksanakan beberapa tahapan atau tidak dalam sekali pelaksanaan penggunaan. Penggunaan ini urut sesuai agenda yang dilaksanakan PDI Perjuangan setelah turunya instruksi oleh Ketua DPP Puan Maharani dalam forum Legislatur Summit.

Tabel 3.3**Penggunaan Pembiayaan Gotong Royong Masing-masing Karesidenan
Diseluruh Jawa Tengah**

No	Nama Karesidenan	Penggunaan Pembiayaan
1	Surakarta	<ol style="list-style-type: none">1. Rakercabsus ditingkat cabang2. Pembiayaan Saksi3. Pembiayaan Deklarsi4. Pembiayaan Sosialisasi5. Pembiayaan Rapat Koordinasi
2	Semarang	<ol style="list-style-type: none">1. Rakercabsus ditingkat cabang2. Pembiayaan Saksi3. Pembiayaan Deklarasi4. Pembiayaan Rakerdasus tingkat Provinsi (Menerima bantuan biaya dari DPP dan DPD)5. Pembiayaan Rapat Koordinasi
3	Pati	<ol style="list-style-type: none">1. Pembiayaan Rakercabsus2. Pembiayaan Rapat Konsolidasi3. Pembiayaan Saksi4. Pembiayaan Deklarasi5. Pembiayaan Rapat Pertemuan
4	Pekalongan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembiayaan Rakercabsus2. Pembiayaan Saksi3. Pembiayaan Deklarasi4. Pembiayaan Rapat Pertemuan
5	Kedu	<ol style="list-style-type: none">1. Pembiayaan Rakercabsus2. Pembiayaan Saksi3. Pembiayaan Deklarasi4. Pembiayaan Rapat Koordinasi
6	Banyumas	<ol style="list-style-type: none">1. Pembiayaan Rakercabsus2. Pembiayaan Saksi3. Pembiayaan Deklarasi4. Pembiayaan Rapat Koordinasi

Sumber: diolah peneliti dari hasil interview.

3.1.3. Tujuan Penggunaan Pembiayaan Gotong Royong dalam Pemenangan Pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen

a. Karesidenan Surakarta

Tujuan penggunaan pembiayaan Gotong Royong tidak lain untuk proses pemenangan Ganjar-Yasin dalam Pemilu pada Jawa Tengah tahun 2018. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk bertujuan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak melalui kampanye terbuka cukup turun langsung bersama masyarakat untuk gotong royong memasang atribut atau alat peraga kampanye Ganjar-Yasin diseluruh Solo Raya.

Selain itu tujuan lain dari penggunaan pembiayaan ini adalah untuk membiayai setiap pertemuan dengan Regu Penggerak Pemilih, Komunitas Juang, Kawan Suluh Perjuangan untuk diberikan pembekalan baik tugas yang harus dilaksanakan dalam proses pemenangan Ganjar-Yasin di Solo Raya. Dalam prosesnya penggunaan pembiayaan gotong royong tidak menemui suatu kendala yang berarti, ini dikarenakan masing-masing tim ditingkat PAC sudah bisa mandiri dalam melaksanakan pembiayaan gotong royong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya Solo Raya memiliki pola gotong royong dalam pembiayaan pemenangan pemilu pada Jawa Tengah tahun 2018.

b. Karesidenan Pati

Tujuan penggunaan pembiayaan gotong royong di Pati Raya adalah untuk memudahkan dan meringankan pembiayaan setiap kegiatan atau aktivitas politik. Dalam penggunaannya tim pemenangan Pati melaksanakan rapat konsolidasi untuk melakukan musyawarah tentang tujuan penggunaan pembiayaan gotong royong ini akan digunakan untuk seluruh pembiayaan yang sudah disepakati secara mufakat. Dapat dikatakan sebelum menggunakan biaya gotong royong, Tim Pati Raya sudah melakukan konsolidasi lebih awal supaya penggunaan pembiayaan gotong royong dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses perjalanan penggunaan pembiayaan gotong royong Tim Pemenangan Pati tidak menemukan permasalahan-permasalahan terkait pembiayaan. Dengan menggunakan asas gotong royong dalam setiap pembiayaannya maka soliditas dan kepercayaan antar anggota terbangun dengan baik. Dengan menentukan besaran biaya yang terakumulasi dalam pembiayaan gotong royong maka tujuan penggunaan pembiayaan gotong royong untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen berjalan dengan baik.

Tujuan lain penggunaan pembiayaan gotong royong adalah untuk menutup kekurangan biaya untuk pembelian alat peraga kampanye. Seperti contoh dalam pendistribusian alat peraga kampanye Tim Pemenangan Pati Raya mendapatkan bantuan alat peraga dari DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah akan lebih mudah dikarenakan Tim sudah memiliki plot-plot anggaran yang sudah ditentukan dalam musyawarah.

Bahkan dalam pemasangan bendera kampanye Tim Pati Raya sudah merapatkan biaya yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya tujuan penggunaan pembiayaan ini digunakan sebagai mekanisme pelaporan secara jujur dan terbuka kepada KPU melalui dokumen LPSDK dan LPPDK. Oleh karena itu manajemen yang dikelola mandiri melalui struktural bendahara partai akan berimbang baik terhadap tujuan penggunaan pembiayaan yang plot-plot anggarannya sudah ditentukan melalui rapat konsolidasi awal PDI Perjuangan Pati.

c. Karesidenan Semarang

Tujuan penggunaan pembiayaan gotong royong PDI Perjuangan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Semarang Raya digunakan untuk berbagai pembiayaan ditingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat kecamatan. Pembiayaan ini digunakan untuk melaksanakan Rakercabsus diseluruh DPC di Karesidenan Semarang, rapat ini

dilaksanakan untuk membentuk serta membahas kegiatan pemenangan Pemilu Jawa Tengah tahun 2018 sekaligus untuk menyambut Pemilu tahun 2019. Selain pembiayaan Rakercabsus digunakan untuk kegiatan internal kepartaian seperti pertemuan internal PDI Perjuangan.

Pembiayaan dalam Rakercabsus memiliki tujuan untuk melaksanakan konsolidasi partai dengan pelaksanaan dan tanggung jawab pembiayaan secara mandiri. Selain kegiatan Rakercabsus dilaksanakan juga Deklarasi yang mengundang partai-partai koalisi Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai NasDem. Seluruh partai koalisi berkolaborasi dalam deklarasi Ganjar-Yasin untuk memenangkan Pasangan Ganjar-Yasin menang dalam Pemilu Jawa Tengah tahun 2018.

Tujuan lain dan utama dari pembiayaan gotong royong adalah menjadi kemandirian PDI Perjuangan dalam membiayai kegiatan atau gerakan-gerakan politik baik internal maupun dilapangan. Kemandirian yang dimaksud adalah menjadikan PDI Perjuangan baik ditingkat PAC sekalipun memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap PDI Perjuangan. Selain itu dengan gotong royong akan memudahkan dan meringankan segala urusan dalam kepartaian yang semula dirasa memiliki beban berat akan terasa ringan dengan gotong royong.

d. Karesidenan Pekalongan

Pekalongan merupakan karesidenan yang notabeneanya dalam Pemiluakada Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan sosialisasi dan konsolidasi pemenangan dengan Santri yang berada di Pekalongan. Selanjutnya santri yang digadang-gadang akan memberikan efek dukungan kepada pasangan Ganjar-Yasin ini diberi nama Santri Gayeng. Sesuai dengan tagline pasangan Ganjar-Yasin yakni “Jateng Gayeng” pemberian nama kepada santri yang akan mendukung penuh dalam pemenangan Pemiluakada Jawa Tengah tahun 2018.

Selain bertujuan untuk konsolidasi pembiayaan gotong royong ini memiliki tujuan yang sama dengan Karesidenan lain, dikarenakan dalam PDI Perjuangan gotong royong merupakan pola dan idee dasar PDI Perjuangan. Gotong royong yang dilaksanakan bertujuan untuk meringankan semua beban dalam proses pemenangan Pemiluakada Jawa Tengah, mulai dari pembiayaan Rakercabsus, Pertemuan antar internal Partai, deklarasi pemenangan Ganjar-Yasin dan kegiatan politik yang lainnya.

Ditingkat anak cabang juga demikian, memiliki tujuan yang sama untuk membiayai petugas-petugas partai ditingkat kecamatan untuk melaksanakan sosialisasi, rapat koordinasi tingkat PAC, distribusi alat peraga kampanye dan yang lain. Pembiayaan gotong royong ditingkat PAC dilaksanakan secara mandiri oleh pengurus yang ada di PAC tersebut tanpa meminta-minta ke pihak lain dan

dilaksanakan secara gotong royong seluruh struktural PAC. Hal ini memiliki tujuan untuk menguatkan rasa kepedulian dan kepemilikan partai hingga tingkatan paling dasar.

e. Karesidenan Kedu

Proses panjang dalam Pemenangan Ganjar-Yasin juga dirasakan seluruh daerah baik Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tidak terkecuali Karesidenan Kedu. Magelang merupakan daerah pemenangan yang disorot lebih dalam pemenangan Ganjar-Yasin, hal ini dikarenakan Magelang memiliki wakil dari Kader PDI Perjuangan yang duduk dikursi Legislatif maupun kursi Eksekutif sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Penggunaan pembiayaan gotong royong di Magelang juga tersebar dalam plot berbagai kegiatan Politik pemenangan Ganjar-Yasin.

Parade Budaya Kebangsaan yang didalam kegiatan ini juga disemarakan kegiatan Deklarasi Tim Pemenangan Ganjar-Yasin Kabupaten Magelang. Acara deklarasi ini dilaksanakan di Lapangan Pasturan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Deklarasi yang dikemas dengan pementasan puluhan kelompok kesenian dan diakhiri dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Warseno Slank. Acara Deklarasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung pasangan Ganjar-Yasin dalam Pemiluakada Jawa Tengah tahun 2018.

Deklarasi dihadiri oleh semua kalangan lintas etnis, agama, golongan, relawan dan juga tak absen santri gayeng sebagai pendukung loyal pasangan Ganjar-Yasin. Ketua Tim Pemenangan Sariyan Adiyanto dalam deklarasi Ganjar-Yasin mengatakan;

“Kami semua disini telah sepakat bahwasanya NKRI merupakan harga mati bagi kita semua, dan saya berharap besok pada tanggal 27 Juni 2018 Ganjar Yasin terpilih mengawal keberagaman, tetap menjaga NKRI, dan Pancasila menjadi Ideologinya”

Deklarasi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan memiliki tujuan untuk menjaga soliditas pemilih sekaligus menarik simpati dari masyarakat untuk memilih pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen. Selain deklarasi masih banyak kegiatan dan gerakan pemenangan yang lainnya yang semata-mata memiliki tujuan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen dalam Pemilu dengan porsi pembiayaan seefisien mungkin dengan melaksanakan gotong royong untuk memikul beban bersama agar terasa ringan dan menguatkan solidaritas antar anggota PDI Perjuangan.

f. Karesidenan Banyumas

Ketua Tim Pemenangan Banyumas menjelaskan tujuan pentingnya pembiayaan gotong royong, hal ini diungkapkan dalam PDI Perjuangan selalu dianjurkan untuk melaksanakan gotong royong. Maksud anjuran ini adalah tidak ada yang paling hebat di PDI Perjuangan atau dengan kata lain seluruh anggota PDI Perjuangan memiliki derajat yang sama dalam Politik. Anjuran gotong royong ini bertujuan untuk saling membantu bersama-sama dalam pemenangan kontestasi Politik. Dalam proses pemenangan Pemilukada Kabupaten Banyumas juga menggunakan pola gotong royong, demikian juga dalam Pemilukada Jawa Tengah menerapkan pola gotong royong yang sedemikian rupa.

Sampai dengan hari ini di Banyumas tidak ada perwakilan pusat yang datang ke Banyumas namun pelaksanaan pemenangan Pemilukada Jawa Tengah terus berlangsung. Seperti dalam melaksanakan sosialisasi untuk daerah pemilihanya yang saat itu dan sekarang ini mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Sehingga pembiayaan gotong royong memiliki tujuan utama untuk pemenangan Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018 dan berlanjut sampai saat ini untuk proses pemenangan Pileg dan Pilpres tahun 2019.

Sehingga ini bukan merupakan sebuah rahasia internal PDI Perjuangan lagi, dimana-mana dalam setiap kontestasi politik untuk bagaimana menarik simpati masyarakat untuk memenangkan proses Pemilu tersebut. Dengan demikian dalam proses pemenangan Pemilukada yang dibiayai secara bersama-sama melalui mekanisme gotong royong tidak akan menimbulkan beban personal baik didalam kontestasi Pemilukada Jawa Tengah kemarin untk memenangkan Gubernur dan Wakil Gubernur bahkan tahun 2019 sekarang ini untuk kembali memenangkan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

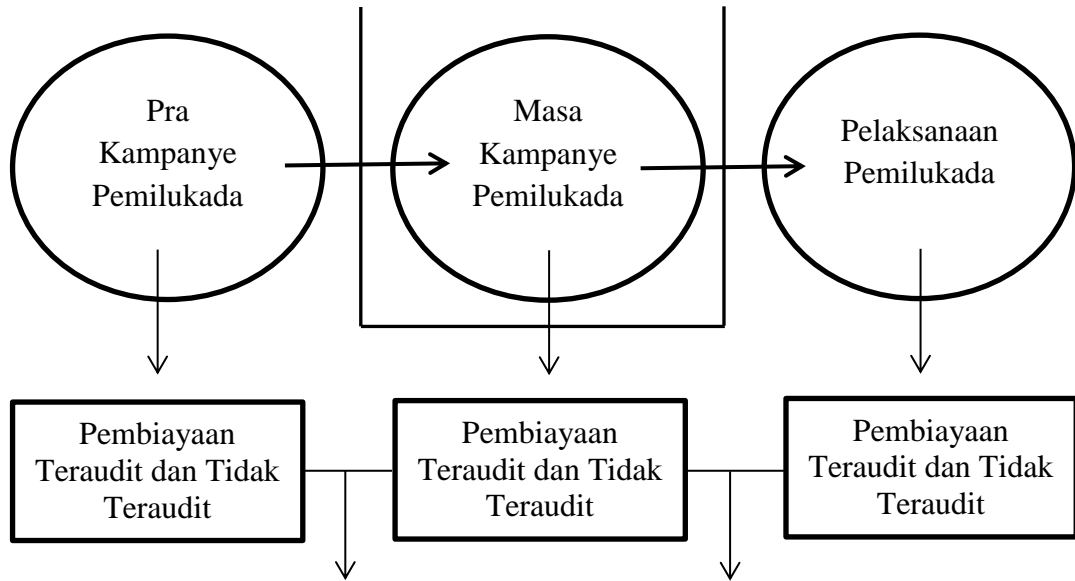
Pola pembiayaan gotong royong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam pemilukada Jawa Tengah tahun 2018, memiliki empat keutamaan pokok yakni, sumber pembiayaan, bentuk-bentuk pembiayaan, penggunaan pembiayaan dan tujuan pembiayaan. Hal ini dapat dijelaskan mengenai sangat pentingnya pembiayaan kepartaian, terlebih dengan banyaknya issue mengenai mahalnya biaya untuk menjadi seorang kepala daerah ditingkat provinsi.

Pembagian tim pemenangan Ganjar-Yasin yang dimulai dari tingkat provinsi, sampai tingkat kabupaten dan kota diseluruh Provinsi Jawa Tengah adalah dalam rangka untuk saling membantu dalam memenangkan Ganjar-Yasin. Setelah memahami penjelasan empat bab utama dalam pembiayaan gotong royong, dapat dijelaskan

mengenai Pola Pembiayaan Gotong Royomg PDI Perjuangan dalam Pemenangan Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018.

Bagan 3. 3

Alur Pembiayaan Gotong Royomg Pemenangan Pemilukada



Teraudit	Tidak Teraudit
Pertemuan terbatas	Rakercabsus Tingkat Kabupaten/Kota
Pertemuan tatap muka	Pembiayaan Saksi Dimasing-masing Kabupaten/Kota
Pembuatan design Alat Peraga Kampanye	Pembiayaan Deklarasi tingkat kabupaten/kota
Rapat Umum	Pembiayaan Sosialisasi
Penyebaran bahan kampanye kepada umum	Pembiayaan Rapat Koordinasi
Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan KPU	Pembelian mobil 35 unit untuk Satgas NKRI
Pembiayaan lain-lain	Pembelian 5 unit mobil untuk lima partai penggusung

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2019

Alur pembiayaan dalam Pemilu Jawa Tengah oleh tim pemenangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen dibagi menjadi tiga tahapan pembiayaan. Pembiayaan sebelum pemilu dilaksanakan yang terbagi menjadi dua pembiayaan yakni teraudit secara KPU dan tidak teraudit. Pembiayaan pada masa kampanye Ganjar-Yasin yang dilaksanakan oleh tim kampanye setiap kabupaten/kota yang teraudit dan tidak teraudit. Yang ketiga pembiayaan saat pelaksanaan pemilu yang digunakan untuk membiayai sakis, Regu Penggerak Pemilih (Guraklih) yang semua dilaksanakan secara gotong royong.

Dari segi akuntabilitas dan pelaporan pembiayaan tim pemenangan Ganjar-Yasin terbagi menjadi dua pelaporan, yang pertama secara resmi dilaporkan kepada KPU. Dokumen pelaporan yang resmi seperti, LADK, LPSDK, LPPDK yang dikelola tim dan selanjutnya dilaporkan kepada KPU sebagai bentuk akuntabilitas. Dalam interview dengan ketua DPD PDI Perjuangan, beliau mengatakan;

“yang bisa diaudit itu dana iuran gotong royong dari kader partai, yang berasal dari tiga pilar partai yang jumlahnya tidak ditentukan, ada legislatif, eksekutif dan Calon. Laporan keuangan resmi dapat dilihat di KPUD Jateng, itu yang resmi kepada KPU”

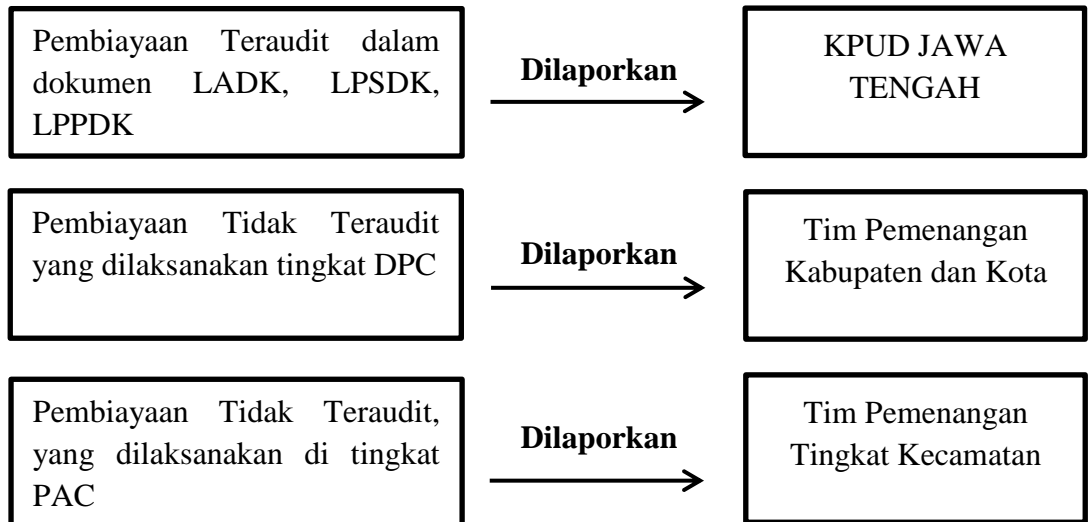
Sedangkan pelaporan pembiayaan yang tidak teraudit atau *underground financial* dilaporkan kepada setiap pimpinan partai yang saat itu melaksanakan pembiayaan gotong royong. *Underground Financial* tidak murni sebuah ketidak adanya pertanggungjawaban kepada KPU, dalam wawancara peneliti dengan ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menjelaskan mengenai dana yang tidak teraudit dalam pembiayaan pemenangan pilukada.

“*underground financial* atau dana yang tidak teraudit tidak murni jelek, justru di Jawa Tengah inilah pembiayaan dengan pola gotong royong yang mengamankan jiwa sosial, kata ketua Tim Pemenangan Pilukada Jawa Tengah”

Pembiayaan yang tidak teraudit merupakan pembiayaan yang dilaksanakan oleh tiga pilar partai dalam membiayai kegiatan-kegiatan politik yang tidak termaktub dalam LPSDK. Sedangkan untuk pertanggungjawaban setiap pembiayaan dilaksanakan dan dilaporkan kepada masing-masing ketua tim pemenangan yang berada ditingkat kabupaten dan kota. Bahkan seperti pembiayaan untuk rapat koordinasi ditingkat kecamatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dilaporkan kepada ketua tim pemenangan tingkat kecamatan se-Jawa Tengah.

Bagan 3.4

Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pemilukada



Sumber: diolah oleh peneliti